

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN BELITUNG DAN UNIT PELAYANAN

PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) SATRESKRIM POLRES BELITUNG

Pada bab sebelumnya sudah dibahas latar belakang mengapa penelitian dilakukan. Selanjutnya, bab ini berisi informasi umum yang dibutuhkan berkaitan dengan situs penelitian dan instansi tujuan peneliti untuk menggali informasi sesuai kebutuhan penelitian. Dengan kata lain, bab ini akan menguraikan profil umum Kabupaten Belitung, Polres Belitung, dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Belitung. Bab ini diperlukan sebagai dasar informasi situs penelitian untuk memudahkan pembaca memahami pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Belitung

2.1.1 Pemerintah Kabupaten Belitung

Pemerintahan Kabupaten Belitung saat ini dipimpin oleh Bupati H. Djoni Alamsyah, S. Sos, dengan Wakil Bupati Syamsir, S. Ikom, yang terpilih melalui pemilihan kepala daerah periode 2024-2029. Pemerintah Kabupaten Belitung sendiri memiliki visi “Kabupaten Belitung sejahtera, berdaya saing, inovatif, dan bermartabat”.

Sedangkan misi dari Pemerintah Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna mendukung percepatan pembangunan daerah.
- b. Mewujudkan kemandirian perekonomian daerah melalui pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal dan optimalisasi peranan usaha mikro kecil dan menengah.
- c. Reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

- d. Menciptakan stabilitas politik, keamanan, kedamaian, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.

2.1.2 Kondisi Geografis Kabupaten Belitung

Kabupaten Belitung merupakan salah satu kabupaten yang menjadi bagian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kabupaten Belitung terletak di titik koordinat antara 107°58 hingga 107°58 bujur timur dan 02°30 hingga 03°15 lintang selatan. Kabupaten Belitung memiliki luas wilayah mencapai sekitar 2.293,69 km yang terbagi dalam lima kecamatan yaitu Kecamatan Membalong, Kecamatan Tanjungpandan, Kecamatan Badau, Kecamatan Sijuk, dan Kecamatan Selat Nasik dengan jumlah keseluruhan daerah administratif sebanyak 7 kelurahan dan 42 desa.

Gambar 2.1

Peta Kabupaten Belitung



Sumber: Website Pemerintah Kabupaten Belitung, portal.belitung.go.id

Kabupaten Belitung sendiri memiliki ketinggian kurang lebih 500 m dari atas permukaan laut dengan puncak tertinggi ada pada daerah Gunung Tajam. Keadaan topografi Pulau Belitung yang cenderung bergelombang dan berbukit-bukit telah membentuk pola aliran sungai yang mengalir ke daerah pantai sehingga di daerah hilir atau pantai terdiri atas beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) utama, yaitu sebelah utara oleh DAS Buding, Sebelah selatan oleh DAS Pala dan Kembiri, dan Sebelah Barat oleh DAS Brang dan Cerucuk.

2.1.3 Kondisi Demografis Kabupaten Belitung

2.1.3.1 Penduduk Kabupaten Belitung

Berdasarkan data yang diperoleh dari catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Belitung, jumlah penduduk Kabupaten Belitung pada tahun 2024 mencapai 191.405 jiwa, dimana menunjukkan adanya peningkatan dari jumlah 189.225 jiwa pada tahun 2023. Berikut adalah data statistik kependudukan di Kabupaten Belitung berdasarkan masing-masing kecamatan pada tahun 2024.

Tabel 2.1

Data Kependudukan Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km2	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Membalong	27.4	2.15	14.25	30	106
Tanjungpandan	109.9	6.6	57.1	290	102
Badau	15.8	4.26	8.22	35	107
Sijuk	33.4	6.45	17.34	81	105
Selat Nasik	6	4.9	3.09	45	105
Belitung	192.4	5.67	100	84	104

Sumber: Data Kependudukan dan Migrasi, BPS Kabupaten Belitung Tahun 2024.

Distribusi penduduk di Kabupaten Belitung berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin menunjukkan komposisi yang seimbang antara penduduk laki-laki dan perempuan. Jumlah keseluruhan penduduk berjenis kelamin laki-laki di Kabupaten Belitung pada tahun 2023 adalah 96.400 jiwa dan meningkat pada tahun 2024 sebesar 97.399 jiwa. Sementara jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan pada tahun 2023 adalah sebesar 97.399 jiwa dan di tahun 2024 menjadi 92.825 jiwa. Dari data keseluruhan jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin oleh BPS Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung didominasi oleh penduduk usia anak dan usia produktif (dewasa) yaitu usia 15-65 tahun.

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Belitung

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Belitung (Jiwa)					
	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki+Perempuan	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
0-4	7713	7854	7481	7598	15194	15452
5-9	6927	7062	6637	6781	13564	13843
10-14	6924	6836	6652	6557	13576	13393
15-19	7470	7388	7162	7093	14632	14481
20-24	7877	7786	7695	7600	15572	15386
25-29	8471	8335	8079	8098	16550	16433
30-34	8100	8363	7316	7619	15416	15982
35-39	7227	7213	6588	6537	13815	13750
40-44	7179	7223	6915	6900	14094	14123
45-49	6899	6886	6678	6727	13577	13613
50-54	6285	6471	5882	6100	12167	12571
55-59	5123	5263	4792	4924	9915	10187
60-64	4013	4194	3830	4035	7843	8229
65-69	2763	2916	2791	2890	5554	5806
70-74	1757	1841	2064	2165	3821	4006
75+	1672	1768	2263	2382	3935	3409
Jumlah	96400	97399	92825	94006	189225	191405

Sumber: Data Kependudukan dan Migrasi, BPS Kabupaten Belitung.

2.1.3.2 Perekonomian Kabupaten Belitung

Di sektor perekonomian, pada indikator ketenagakerjaan tahun 2023, Kabupaten Belitung memiliki total penduduk angkatan kerja sebesar 100.297 jiwa dengan total penduduk yang bekerja atau memiliki pekerjaan sebesar 96.145 jiwa dan penduduk yang tidak bekerja atau pengangguran sebesar 4.152 jiwa. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Belitung pada tahun 2024 adalah mencapai sebesar 68,18 persen dari sebelumnya pada tahun 2023 sebesar 68,09 persen, dimana menunjukkan adanya peningkatan setelah sebelumnya turun 1,03 poin pada periode 2021-2022 yaitu 65,25 persen pada tahun 2022 dan 66,28 persen pada tahun 2021.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Belitung sendiri di tahun 2023 tercatat sebesar Rp80,45 juta per tahun, sehingga menempatkan Kabupaten Belitung ini pada peringkat ke 104 secara nasional. Pada tahun 2023, perekonomian Kabupaten Belitung mengalami pertumbuhan sebesar 5,75 persen, yang mana merupakan pertumbuhan tertinggi sejak lima tahun terakhir. Perekonomian Kabupaten Belitung sendiri didukung oleh tiga sektor utama, yaitu pertama adalah industri pertambangan berupa bahan-bahan galian seperti timah, bijih besi, tanah liat, pasir bangunan, serta kaolin, meskipun sektor ini mengalami pertumbuhan negatif sebesar -1,75 persen di tahun 2023 namun sektor ini tetap menjadi bagian dari struktur ekonomi Kabupaten Belitung. Kemudian yang kedua disusul oleh sektor pertanian dan perkebunan berupa ekspor rempah seperti lada dan perkebunan minyak sawit mentah (CPO). Sektor ketiga adalah kelautan dan perikanan, yang kemudian menjadi sektor mata pencaharian cukup besar bagi masyarakat terutama di daerah pesisir serta menunjang sektor pariwisata Kabupaten Belitung yang menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun asing

sehingga juga dapat meningkatkan perekonomian dan pendapatan bagi usaha yang dilakukan masyarakat lokal.

2.1.3.3 Pendidikan Kabupaten Belitung

Pada sektor pendidikan, berdasarkan data yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Belitung per Juni 2024 menunjukkan distribusi tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Belitung untuk tamatan SD sejumlah 45.820 jiwa atau sebesar 23,97 persen, tamatan SMP sejumlah 26.960 jiwa atau sebesar 14,09 persen, tamatan SMA sejumlah 39.410 jiwa atau sebesar 20,61 persen, tamatan D1/D2 sejumlah 1.010 jiwa atau sebesar 0,53 persen, tamatan D3 sejumlah 3.326 jiwa atau sebesar 1,74 persen, tamatan S1 sejumlah 7.263 jiwa atau sebesar 3,8 persen, tamatan S2 sejumlah 255 jiwa atau sebesar 0,13 persen, tamatan S3 sejumlah 5 jiwa atau sebesar 0,003 persen, belum tamat SD sejumlah 30.860 jiwa atau sebesar 16,13 persen, dan penduduk tidak/belum sekolah sejumlah 36.350 jiwa atau sebesar 19,01 persen.

Tabel 2.3

Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Belitung

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Belitung		
	Jumlah		
	2021	2022	2023
SD/ MI	98.91	98.09	98.08
SMP/ MTs	84.09	79.54	79.47
SMA/ SMK/ MA	56.15	51.89	54.47

Sumber: Data Pendidikan, BPS Kabupaten Belitung, 2021-2023

2.2 Gambaran Umum Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Belitung

2.2.1 Profil Polres Belitung

Polres Belitung beroperasi di bawah naungan Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung atau Polda Babel. Sebelum terbentuknya Polda Kepulauan Bangka Belitung, wilayah Belitung masuk ke dalam yuridiksi Polda Sumatera Selatan dan berada di bawah pengawasan Polres Belitung. Setelah pemekaran wilayah dan pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2000, maka sesuai dengan Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/07/XII/2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Pembentukan Polwil Kepulauan Bangka Belitung dibentuklah Polwil Kepulauan Bangka Belitung yang kemudian setelah lebih kurang dua tahun statusnya ditingkatkan menjadi Polda Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/11/III/2003 tanggal 13 Maret 2003. Oleh karena itu, Polres Belitung kemudian menjadi bagian dan dibawah oleh Polda Kepulauan Bangka Belitung.

Wilayah hukum Polres Belitung mencakup seluruh wilayah kabupaten Belitung yang terdiri dari lima kecamatan yaitu Kecamatan Tanjungpandan, Kecamatan Sijuk, Kecamatan Membalong, Kecamatan Badau, dan Kecamatan Selat Nasik Dengan itu, Polres Belitung juga membawahi Kepolisian Sektor atau Polsek di tiap wilayah kecamatan tersebut. Saat ini, Polres Belitung sendiri berkedudukan di Jl. Sijuk No. 2, Paal Satu, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung.

Gambar 2.2
Tampak Depan Gedung Polres Belitung



Sumber: Humas Polres Belitung

Polres Belitung menjadi bagian dari kerangka Kepolisian Republik Indonesia di Kabupaten Belitung. Jumlah personel anggota Polres Belitung saat ini adalah sebanyak 513 orang, terdiri dari 499 anggota Polri dan 14 PNS Polri. Dalam mencapai tujuan dalam pelaksanaan tugasnya, Polres Belitung tentu memiliki tujuan yang tertuang dalam visi dan misi instansi. Sejalan dengan visi dan misi Polda Kepulauan Bangka Belitung, visi Polres Belitung adalah: “Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri, serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif”. Adapun misi dari Polres Belitung adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan deteksi dini terhadap potensi-potensi yang dapat menimbulkan gangguan kamtibmas dan memberikan peringatan dini kepada masyarakat dengan melakukan kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.
2. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat secara mudah, responsif, dan tidak diskriminasi.

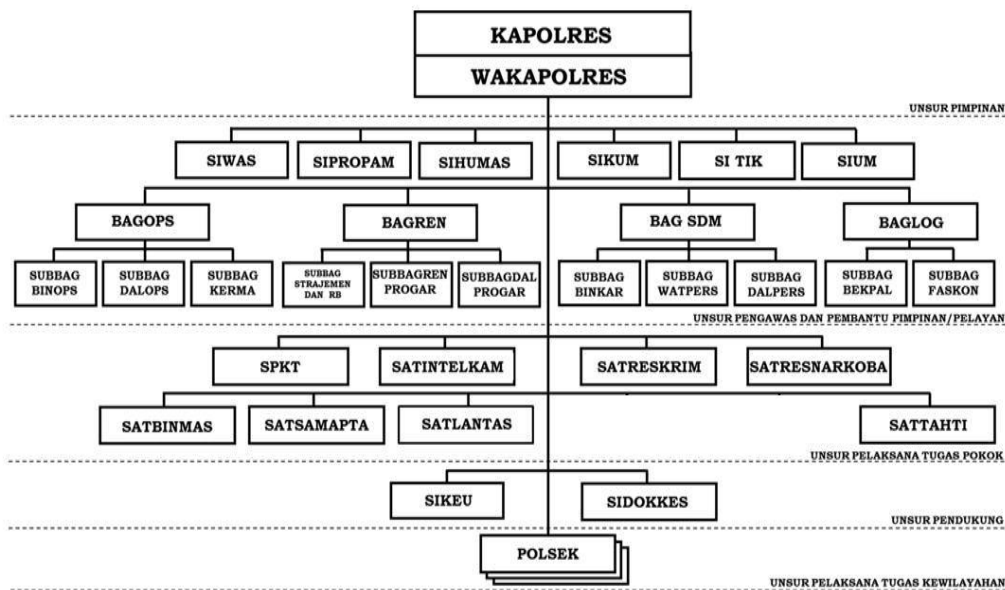
3. Mewujudkan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu-lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang di seluruh wilayah Kabupaten Belitung.
4. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan yang terjadi di wilayah hukum Polres Belitung.
5. Menghadirkan sedekat-dekatnya polisi dengan masyarakat dalam rangka kecepatan pemberian bantuan maupun pertolongan kepada masyarakat dengan etika standar pelayanan yang tinggi.
6. Mewujudkan sinergi polisional dalam rangka mengeliminasi problem-problem di atas batas ambang gangguan kamtibmas yang mengendap di berbagai bidang baik pemerintahan maupun masyarakat.
7. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum.
8. Menegakkan hukum secara profesional, obyektif, proporsional, transparan, dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pencari keadilan.
9. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern terhadap seluruh sumber daya Polres Belitung guna mendukung tugas-tugas bidang operasional dan pembinaan.
10. Membangun sistem sinergi polisional dengan instansi pemerintah dan samping, maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (*partnership building/networking*).

11. Terwujudnya perubahan cara berpikir (mindset) personil Polres Belitung dan pola kinerja dari penindak menjadi pelayanan masyarakat (*public service*).

Untuk dapat memudahkan dan memfokuskan penanganan perkara tindak pidana yang ada di wilayah hukum Polres Belitung, maka tatanan kepemimpinan dibagi menjadi beberapa bagian yang pada masing-masing bagian telah memiliki tugas dan kewenangan masing-masing untuk menangani tiap perkara sesuai dengan porsi masing-masing. Berikut adalah struktur organisasi tingkat polres berdasarkan tatanan unsur yaitu Unsur Pimpinan, Unsur Pegawai dan Pembantu Pimpinan, Unsur Pelaksana Tugas Pokok, Unsur Pendukung, dan Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan.

Gambar 2.3
Struktur Organisasi Tingkat Polres

STRUKTUR ORGANISASI TINGKAT POLRES



Sumber: Humas Polres Belitung

2.2.2 Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Belitung

Penanganan kasus yang berkaitan dengan adanya tindak pidana yang melibatkan perempuan dan anak menjadi tanggung jawab dan wewenang dari bagian Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, memberikan perlindungan terhadap korban perempuan dan anak-anak, pengadaan fungsi rekognisi dalam rangka untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan terhadap masyarakat, serta melakukan koordinasi dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada spek operasional maupun administrasi yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Satreskrim Polres dipimpin oleh seorang Kasatreskrim yang bertanggung jawab langsung kepada Kapolres. Kasatreskrim Polres Belitung saat ini dipimpin oleh AKP Fatah Meilana, S. I, K., M. H.

Khusus pada penanganan kasus tindak pidana yang melibatkan perempuan dan anak, Satreskrim melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas tersebut. Pelaksanaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tugas dan fungsi Unit PPA.

Adapun tugas Unit PPA diatur dalam Pasal 3 yang berbunyi: Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Sementara itu dalam Pasal 2 dijabarkan bahwa Unit PPA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

4. Penyelenggaraan Pelayanan dan Perlindungan Hukum;
5. Penyelenggaraan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana;
6. Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi dengan Instansi Terkait.

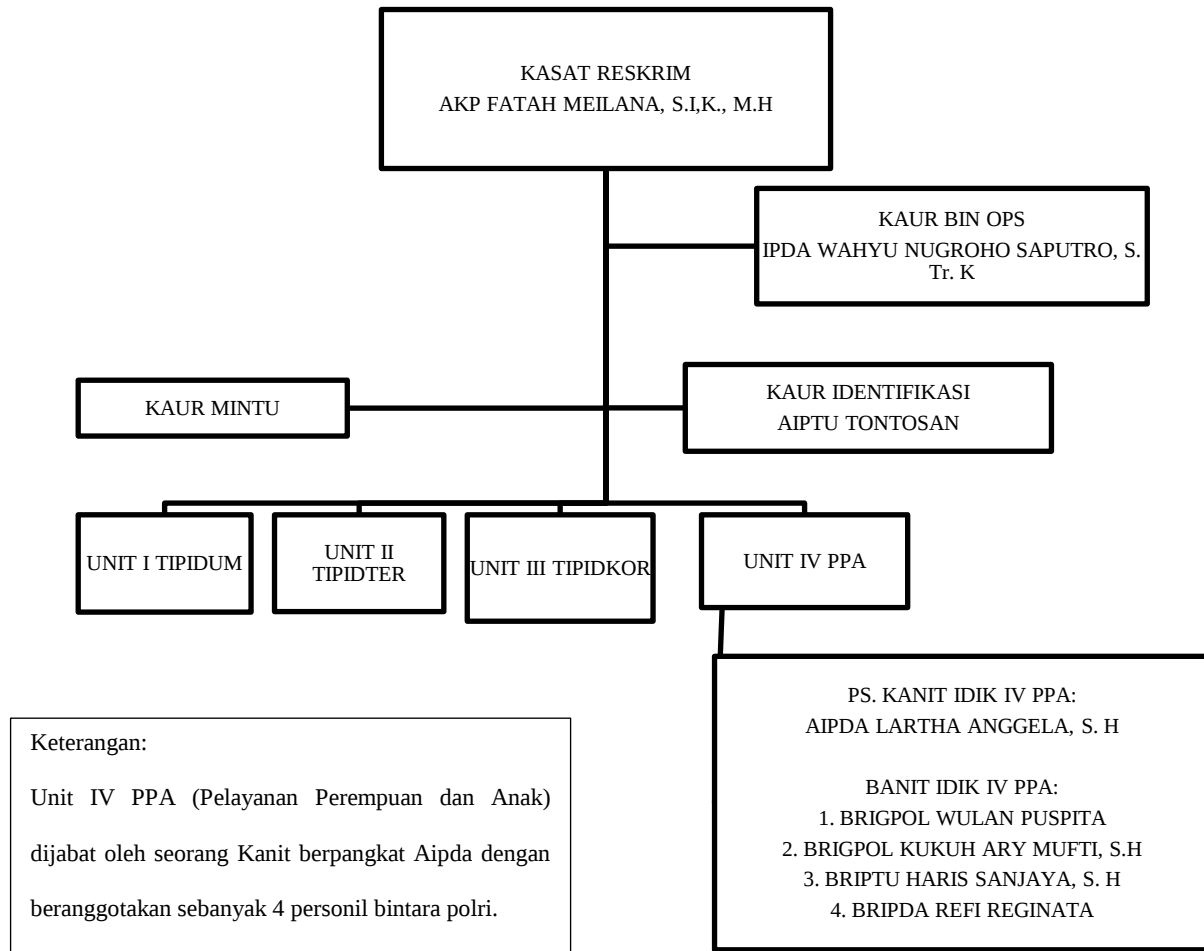
Sedangkan wewenang Unit PPA sendiri adalah sebagai berikut:

5. Melaksanakan penyidikan (melakukan pemanggilan, pemeriksaan dan pemberkasan kasus-kasus) dan penyelidikan terhadap pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak.
6. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait bagi tersangka dibawah umur, serta pemeriksaan barang bukti dengan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait.
7. Menyelesaikan semaksimal mungkin kasus-kasus yang diserahkan ke Unit PPA.
8. Menyiapkan data kasus kejahatan yang ditangani.

Unit PPA Satreskrim Polres Belitung sendiri dipimpin oleh seorang Kepala Unit atau Kanit yaitu Aipda Lartha Anggela, S. H, yang bertanggungjawab langsung pada Kasatreskrim, dibantu dengan sejumlah empat orang anggota penyidik. Pelaksanaan tugas dan fungsi oleh Unit PPA Satreskrim Polres Belitung dilakukan tentunya dengan koordinasi dan melaksanakan pertanggung jawaban antar kepala, bagian, atau divisi yang terdapat di dalam struktur organisasi Unit PPA Satreskrim Polres Belitung yang telah ditetapkan sesuai aturan yang berlaku. Berikut adalah struktur organisasi Unit PPA Satreskrim Polres Belitung.

Gambar 2.4

Bagan Struktur Organisasi Unit PPA Satreskrim Polres Belitung



Sumber: Unit IV PPA Satreskrim Polres Belitung